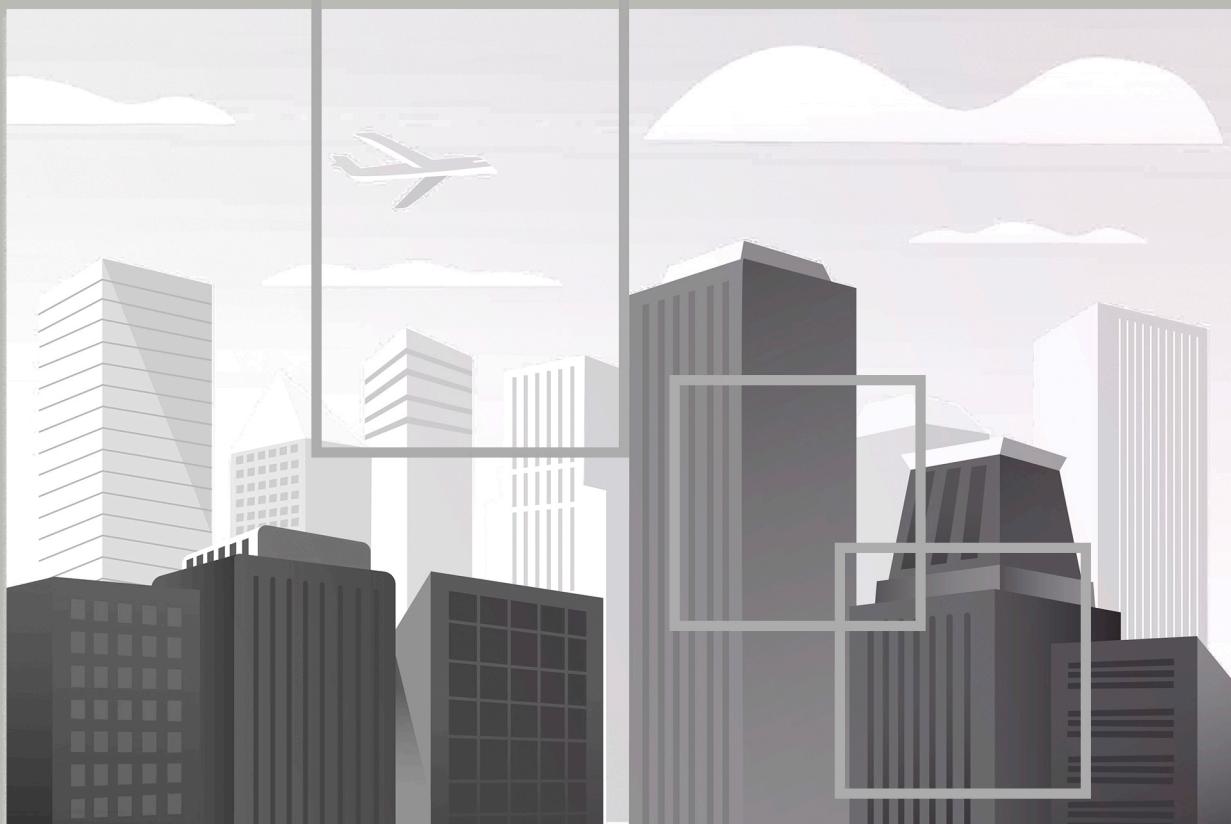


**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BANTEN**



**TRIWULAN<sup>3</sup>  
2023  
LAPORAN KINERJA**



## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi Banten ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebagai salah satu Instansi Pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai media informasi, pertanggungjawaban kinerja serta sebagai alat pengendali menuju terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan program pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran pencapaian kinerja kegiatan atas dokumen rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun. Dalam laporan kinerja ini dijabarkan mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerjanya jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja.

Akhir kata, semoga penyajian laporan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten dapat menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) pada akhir tahun 2023.

Serang, September 2023

**Plt. INSPEKTUR DAERAH**



**Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc.**  
**NIP. 19631210 199003 1 005**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
BAB II.....	7
HASIL MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN III.....	7
I.    Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten .....	7
II.   Program Penyelenggaraan Pengawasan.....	8
III.  Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.....	11
BAB III.....	14
PENUTUP .....	14

**BAB I****PENDAHULUAN**

Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian merupakan upaya untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan. Data hasil pemantauan ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengendalian dan bahan bagi pelaksanaan evaluasi, baik evaluasi tahap pelaksanaan (*ongoing*), evaluasi hasil, maupun evaluasi pra-rencana (*exante*).

Kebutuhan akan data secara sistematis sangat menentukan kualitas pengendalian dan hasil evaluasi. Kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati.

Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program), selain itu kegiatan monitoring juga dapat memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan untuk melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan target. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sedangkan Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya.

Pelaksanaan Anggaran merupakan bagian dari siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu indikator penting untuk

mengetahui kinerja APBD adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran. Besaran pagu anggaran yang dapat direalisasikan dapat mencerminkan berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi yang semakin merata dan stabilitas perekonomian yang makin terjaga. Mengingat pentingnya penyerapan anggaran dalam menggerakkan perekonomian bangsa, maka perlu dilakukan berbagai langkah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran.

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bagian dari siklus manajemen, termasuk manajemen pembangunan. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan diperlukan sebagai umpan balik dalam proses perencanaan program/kegiatan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Evaluasi kegiatan program dan anggaran kinerja menggunakan format dengan pendekatan indikator kinerja dengan menggunakan alat ukur kerangka logis (input, output, outcome, benefit dan impact). Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja yang dilakukan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi, sektor, tematik, dan bantuan Negara. Kegunaan Evaluasi, adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan, program dan kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai ;
2. Memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai2 yang mendasari pemilihan tujuan dan target ;
3. Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif dan efisien;
4. Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek;
5. Menjadikan kebijakan, program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik;
6. Mambantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan proyek ;
7. Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi;
8. Negosiasi antara evaluator dan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Pengendalian merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan Pimpinan organisasi melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya.

Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan dilakukan untuk memenuhi/menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Banten. Pada Tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Banten terdiri dari 3 (tiga) program dengan 11 (sebelas).

Pengukuran pencapaian kinerja dihitung berdasarkan target dokumen Perjanjian kinerja yang ditetapkan di awal tahun anggaran dibandingkan dengan realisasi capaian pada akhir periode anggaran. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan dari penetapan kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

### LAPORAN KINERJA TRIWULAN III

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Monitong dan Evaluasi Kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja dan pengelolaan data Kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat ketercapaian berupa keberhasilan/kegagalan kinerja yang diperjanjikan dan telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Alur kerja yang dilakukan adalah Unit Kerja melakukan pengukuran kinerja sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja. Hasil pengukuran kinerja merupakan sumber data kinerja yang digunakan dalam penyusunan laporan kinerja.

Penetapan kinerja tahun 2023 merupakan tahun ke-1 Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026, dengan penetapan kinerja sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Target Indikator Kinerja Program Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70-80
		Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi Internal	Nilai	14
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3.1375
3	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja Pelayanan Publik Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI	Unit Kerja	1 Unit Kerja

**Tabel 1.2**  
**Target Indikator Kinerja Program Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase ketercapaian dari seluruh kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	Persen	100%
a	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100%
b	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100%
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persen	100%
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persen	100%
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah	Persen	100%
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100%
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersusunnya laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100%
h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	Persen	100%
<b>2</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Pesentase jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti</b>	Persen	80%
		<b>Persentase ketercapaian penyelenggaraan pengawasan</b>	Persen	100%
a	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persen	100%
b	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persen	100%
<b>3</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Persentase ketercapaian perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi</b>		
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terciptanya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persen	100%
b	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Persen	100%

## BAB II

### HASIL MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN III

#### I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten

Realisasi program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten sebesar Rp.9.877.757.398, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, anggaran terealisasi Rp. 9.370.888.674 (16.91%)
  - a. Telah terealisasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yaitu pembayaran gaji dan tunjangan ASN Inspektorat Provinsi Banten selama 3 bulan;
  - b. Telah terealisasi Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN selama 3 bulan;
  - c. Telah terealisasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan pada triwulan 1.
2. Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 12.370.000 (4.03%)
  - a. Telah tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 11.170.000;
  - b. Telah tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu penyusunan LKIP tahun 2022 sebesar Rp.1.200.000.
3. Pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah telah terlaksana sebesar Rp.61.950.000 dengan jumlah ASN yang mengikuti diklat substantif sebanyak 19 orang.
4. Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah baru terlaksana Rp.8.652.500 yaitu perjalanan dinas dalam daerah.
5. Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang didalamnya terdapat belanja penyediaan rutin kantor yang telah terlaksana sebesar Rp.403.231.385
  - a. Tersedianya penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 3 bulan;
  - b. Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 3 bulan.
6. Pada kegiatan Pengadaan Barang Daerah Milik Daerah belum ada penyerapan baik dari keuangan maupun kinerja, karena pelaksanaannya masih menunggu e-catalog dari Biro Barjas.

## **II. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

Realisasi kegiatan **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** sebesar Rp. 501,331,000.00 (8,22%) sedangkan realisasi kegiatan **Audit Dengan Tujuan Tertentu** sebesar Rp. 105,683,950.00 (6,26%).

Dengan rincian pengawasan sebagai berikut :

- a. Pada Inspektur Pembantu I, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan internal sebagai berikut :

### **Triwulan I :**

- Monitoring Kas Opname, Stock Opname, dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 20 LHP;
- Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD) Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, sebanyak 20 LHP;
- Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 2 LHP;
- Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, sebanyak 1 LHP;
- Pengawasan Stock Opname Vaksin Covid-19 Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Reviu Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 3 LHP;
- Reviu Belanja Sewa Gedung UPTD PPD Kelapa Dua dan UPTD PPD Serpong Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, sebanyak 2 LHP;
- Reviu Dokumen Perencanaan Hibah/Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 2 LHP;
- Reviu Dokumen Perencanaan Hibah Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 5 LHP;
- Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Triwulan I Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Probit Audit Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Probit Audit Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 2 LHP;

- Audit Ketaatan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten pada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, sebanyak 2 LHP.
  
- b. Pada Inspektor Pembantu II, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan internal sebagai berikut :

**Triwulan I :**

- Monitoring Kas Opname, Stock Opname, dan Rekon Aset Tahap II Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 19 LHP;
- Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas Rencana Pembangunan Gedung Kantor UPTD BPMHP pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Probitry Audit atas Kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung dan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor UPTD PPMHP pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bante, sebanyak 1 LHP;
- Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD) Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, sebanyak 19 LHP;
- Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 2 LHP;
- Audit Kinerja Program Prioritas pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, sebanyak 4 LHP;
- Reviu Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 5 LHP;
- Audit Ketaatan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten pada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, sebanyak 4 LHP;
- Probitry Audit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, sebanyak 1 LHP;
- Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, sebanyak 1 LHP;
- Probitry Audit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, sebanyak 1 LHP;

- Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, sebanyak 1 LHP.
  
- c. Pada Inspektur Pembantu III, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan internal sebagai berikut :  
**Triwulan I :**
  - Verifikasi dan Validasi data pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022, sebanyak 24 LHP;
  - Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten Tahun 2022, sebanyak 1 LHP;
  - Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022, sebanyak 33 LHP;
  - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022, sebanyak 33 LHP.
  
- d. Pada Inspektur Pembantu IV, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan internal sebagai berikut :  
**Triwulan I :**
  - Audit Tujuan Tertentu atas Pekerjaan Struktur Beton Plat Lantai Beton K.300 Ready Mixed Kegiatan Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai (Pekerjaan Breakwater Pelabuhan Perikanan Binuangeun) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021, sebanyak 1 LHP;
  - Audit Tujuan Tertentu atas dugaan masalah Proyek Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Permukiman (Jalan Lingkungan) Perum Pondok Sukatani Permai RT 01 RW 02 Kelurahan Sukatani Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, sebanyak 1 LHP;
  - Audit Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Investasi pada PT. Agrobisnis Banten Mandiri (PT. ABM) Tahun Anggaran 2020 - 2022, sebanyak 1 LHP;
  - Audit Tujuan Tertentu atas Pemanfaatan dan atau Penggunaan Lahan oleh pihak RSUD Banten, sebanyak 1 LHP.

### **III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

1. Pada kegiatan **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** yang didalamnya bertanggungjawab dalam pembuatan kebijakan-kebijakan teknis pengawasan untuk meningkatkan kualitas pengawasan di Provinsi Banten. Sampai dengan triwulan 1 belum melaksanakan kegiatan, karena kegiatan akan dimulai pada triwulan III sesuai dengan matriks rencana aksi.
2. Pada kegiatan **Pendampingan dan Asistensi** pada Inspektur Pembantu IV, telah terlaksana kegiatan sebagai berikut :

#### **Triwulan I :**

- Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022, sebanyak 41 LHP;
- Monitoring dan Evaluasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), yaitu LHKPN dan SPT Tahunan pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022;
- Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022, sebanyak 41 LHP.

### **IV. Optimalisasi Anggaran Tahun 2023**

Pada tanggal 24 Februari 2023 telah diterbitkan Surat Edaran dari Sekretaris Daerah Provinsi Banten, dengan nomor : 902/ 660-Ekbang/2023 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan surat edaran diatas, maka Inspektorat Daerah Provinsi Banten mangambil Langkah-langkah strategis, sebagai berikut :

- 1) Melakukan efisiensi dan rasionalisasi terhadap belanja yang bersifat rutin dan belanja barang/jasa yang sifatnya masih difasilitasi atau menggunakan asset milik Pemerintah Daerah yang tersedia, antara lain :
  - a. Belanja makanan dan minuman;
  - b. Belanja alat tulis kantor;
  - c. Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia;
  - d. Belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja pemeliharaan Gedung kantor;
  - f. Belanja modal kendaraan dinas.

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III**

- 2) Melakukan reviu HPS kegiatan dengan tim APIP terhadap belanja pemeliharaan konstruksi, belanja pengadaan tanah dan belanja kontruksi, serta menjadwal ulang terhadap pelaksanaannya dengan BPKAD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Kas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Inspektorat Daerah Provinsi Banten melakukan optimalisasi anggaran sebagai berikut :

<b>URAIAN</b>	<b>PAGU 2023</b>	<b>PAGU OPTIMALISASI</b>	<b>(+/-)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=(2-3)</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>62,868,778,000</b>	<b>1,185,723,900</b>	<b>61,683,054,100</b>
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	307,170,000	109,647,000	197,523,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Inspektorat)	246,200,000	109,647,000	136,553,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Inspektorat)	12,200,000	-	12,200,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Inspektorat)	12,200,000	-	12,200,000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Inspektorat)	12,900,000	-	12,900,000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Inspektorat)	12,900,000	-	12,900,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Inspektorat)	4,800,000	-	4,800,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Inspektorat)	5,970,000	-	5,970,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	55,424,855,600	-	55,424,855,600
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Inspektorat)	55,057,985,600	-	55,057,985,600
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Inspektorat)	334,470,000	-	334,470,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Inspektorat)	32,400,000	-	32,400,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,400,000,000	730,487,000	669,513,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Inspektorat)	200,000,000	95,400,000	104,600,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Inspektorat)	200,000,000	135,087,000	64,913,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Inspektorat)	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,607,158,600	75,000,000	1,532,158,600
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Inspektorat)	100,000,000	-	100,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Inspektorat)	513,774,700	-	513,774,700
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Inspektorat)	181,040,000	-	181,040,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Inspektorat)	712,343,900	-	712,343,900
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD(Inspektorat)	100,000,000	75,000,000	25,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200,000,000	100,000,000	100,000,000
Pengadaan Mebel (Inspektorat)	100,000,000	100,000,000	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Inspektorat)	100,000,000	-	100,000,000

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III**

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,876,019,000	93,780,000	2,782,239,000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (Inspektorat)	641,462,400	-	641,462,400
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Inspektorat)	2,234,556,600	93,780,000	2,140,776,600
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,053,574,800	76,809,900	976,764,900
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Inspektorat)	80,000,000	-	80,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Inspektorat)	641,804,800	76,809,900	564,994,900
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Inspektorat)	131,770,000	-	131,770,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Inspektorat)	200,000,000	-	200,000,000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>7,789,982,000</b>	<b>3,128,337,500</b>	<b>4,661,644,500</b>
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6,102,504,000	2,708,020,000	3,394,484,000
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Inspektorat)	556,600,000	28,800,000	527,800,000
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	4,451,184,000	2,586,130,000	1,865,054,000
Reviu Laporan Kinerja (Inspektorat)	361,820,000	8,640,000	353,180,000
Reviu Laporan Keuangan (Inspektorat)	632,770,000	26,520,000	606,250,000
Kerjasama Pengawasan Internal (Inspektorat)	27,680,000	8,880,000	18,800,000
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Inspektorat)	72,450,000	49,050,000	23,400,000
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1,687,478,000	420,317,500	1,267,160,500
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (Inspektorat)	733,422,000	256,461,500	476,960,500
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Inspektorat)	954,056,000	163,856,000	790,200,000
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>984,240,000</b>	<b>218,713,200</b>	<b>765,526,800</b>
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	137,756,000	59,443,200	78,312,800
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan (Inspektorat)	137,756,000	59,443,200	78,312,800
Pendampingan dan Asistensi	846,484,000	159,270,000	687,214,000
Pendampingan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Inspektorat)	275,160,000	52,320,000	222,840,000
Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Inspektorat)	571,324,000	106,950,000	464,374,000
<b>TOTAL</b>	<b>71,643,000,000</b>	<b>4,532,774,600</b>	<b>67,110,225,400</b>

## **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan monitoring dan evaluasi ini memberikan informasi tentang kinerja Inspektorat Provinsi Banten pada Triwulan III tahun 2023, baik capaian kinerjanya maupun tingkat penyerapan anggarannya.

Dengan adanya laporan monitoring dan evaluasi ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas rencana aksi yang telah disusun ditahun ini dan sebagai bahan untuk pembuatan rencana aksi ditahun berikutnya agar capaian kinerja serta tingkat penyerapan anggaran dapat optimal sesuai dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis serta tepat sasaran dan berdaya guna.

Serang, September 2023

**Plt. INSPEKTUR DAERAH**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Moch. Tranggono".

**Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc.**  
**NIP. 19631210 199003 1 005**

# **LAMPIRAN**

# **TARGET KINERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023**









**TARGET KINERJA PENGAWASAN  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2023**

No	Area Pengawasan	Jumlah Laporan yang di rencanakan	RPL	Jumlah Laporan yang terealisasi	Target			Realisasi		
					Jul	Agt	Sep	Jul	Agt	Sep
1	2	3	4	5	12	13	14	15	16	17
<b>INSPEKTUR PEMBANTU I</b>										
1	Audit Ketaatan Tahap 1 & 2 di Lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Banten	18 Laporan	September Desember	10 Laporan						
2	Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2023 Tahap 1,2 dan 3	10 Laporan	Maret Juli Oktober Desember	6 Laporan						
3	Probity Audit Tahap I dan II	2 Laporan	Maret September	2 Laporan						
4	Monitoring / Evaluasi BMD	1 Laporan	Juli	1 Laporan						
5	Reviu Dokumen Perencanaan Hibah/Bansos TA 2023	4 Laporan	Juli							
6	Reviu RKA-SKPD Perubahan TA. 2023	39 Laporan	September	39 Laporan						
7	Audit Tujuan Tertentu atas Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi Samsat, Belanja Modal Server, dan Belanja Cetak SKPD Tahun Anggaran 2017 - 2021 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten			1 Laporan						
8	Audit Kinerja Program Pengelolaan Permuseuman Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten		Juli (diluar PKPT)	1 Laporan						
9	Telaahan Sejawat (Peer Review) terhadap Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten		Juli (diluar PKPT)	2 Laporan						
10	Reviu Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Kesehatan Tahap I Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten		Agustus (diluar PKPT)	1 Laporan						
11	Reviu Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pendidikan Tahap I Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten		Agustus (diluar PKPT)	1 Laporan						

No	Area Pengawasan	Jumlah Laporan yang di rencanakan	RPL	Jumlah Laporan yang terealisasi	Target		Realisasi	
					Jul	Agt	Sep	Jul
1	2	3	4	5	12	13	14	15
12	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024		September (diluar PKPT)	39 Laporan				
13	Audit Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Program Rehabilitasi Sosial Tahun Anggaran 2022 pada Balai/UPTD Perlindungan Sosial dan Balai/UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial Provinsi Banten		September (diluar PKPT)	1 Laporan				
14	Reviu Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Kesehatan Tahap II Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten		September (diluar PKPT)	1 Laporan				
15	Reviu Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pendidikan Tahap II Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten		September (diluar PKPT)	1 Laporan				
<b>Jumlah LHP yang ditargetkan</b>				<b>74 LHP</b>				
<b>Jumlah LHP di luar PKPT</b>				<b>48 LHP atau 64.86% dari target LHP</b>				
<b>Jumlah LHP yang direalisasikan</b>				<b>107 LHP atau 144.59% dari target LHP</b>				
<b>INSPEKTUR PEMBANTU II</b>								
1	Audit Ketaatan Program dan Kegiatan Prioritas pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten TA. 2023	16 Laporan	Juli Desember	7 Laporan				
2	Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah Tahun 2023	1 Laporan	Agustus	1 Laporan				
3	Reviu DAK Fisik T.A. 2023	3 Laporan	April September November	8 Laporan				
4	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten		Juli (diluar PKPT)	4 Laporan				
5	Telaahan Sejawat (Peer Review) terhadap Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten		Juli (diluar PKPT)	1 Laporan				

No	Area Pengawasan	Jumlah Laporan yang di rencanakan	RPL	Jumlah Laporan yang terealisasi	Target		Realisasi			
					Jul	Agt	Sep	Jul	Agt	Sep
1	2	3	4	5	12	13	14	15	16	17
6	Audit Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Belanja terkait Hak dan Fasilitasi Pimpinan Pemerintah Provinsi Banten periode September 2021 sampai dengan Juni 2023 pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten		Juli (diluar PKPT)	1 Laporan						
7	Monitoring Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023		Juli (diluar PKPT)	1 Laporan						
8	Reviu atas Laporan Realisasi Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pekerjaan Umum Tahap I Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten		Agustus (diluar PKPT)	1 Laporan						
9	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan III Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten		September (diluar PKPT)	1 Laporan						
10	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten		September (diluar PKPT)	1 Laporan						
11	Evaluasi Hasil Verifikasi Tim Peneliti RKA-SKPD Tahun Anggaran 2024		September (diluar PKPT)	1 Laporan						
12	Reviu atas Laporan Realisasi Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pekerjaan Umum Tahap II Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten		September (diluar PKPT)	1 Laporan						
<b>Jumlah LHP yang ditargetkan</b>					<b>20 LHP</b>					
<b>Jumlah LHP di luar PKPT</b>					<b>12 LHP atau 60% dari target LHP</b>					
<b>Jumlah LHP yang direalisasikan</b>					<b>27 LHP atau 135% dari target LHP</b>					
<b>INSPEKTUR PEMBANTU III</b>										
1	Pengawasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap Urusan Wajib Pelayanan Dasar	4 LHP	Agustus							
2	Monitoring PPDB Provinsi Banten Tahun 2023	5 LHP	Agustus							



No	Area Pengawasan	Jumlah Laporan yang di rencanakan	RPL	Jumlah Laporan yang terealisasi	Target		Realisasi	
					Jul	Agt	Sep	Jul
1	2	3	4	5	12	13	14	15
1	MCP - KPK (Kapabilitas Pengelolaan Resiko Korupsi)	2 Laporan	Juli dan Desember	7 LHP				
2	Pengendalian Gratifikasi	2 Laporan	Juli dan Desember					
3	Evaluasi Benturan Kepentingan	2 Laporan	Juli dan Desember					
4	Monitoring dan Evaluasi terhadap Tindak Lanjut Kehilangan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) milik KPU Provinsi Banten		Juli (diluar PKPT)	1 LHP				
5	Audit Tujuan Tertentu atas Kehilangan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten		Juli (diluar PKPT)	1 LHP				
6	Monitoring Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2023 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten		Juli (diluar PKPT)	1 LHP				
7	Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat atas dugaan Bocornya Surat Pj. Gubernur Banten Nomor : 421/1460-Dindikbud/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI		Juli (diluar PKPT)	1 LHP				
8	Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat atas dugaan Pelanggaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten		Juli (diluar PKPT)	1 LHP				
9	emeriksaan atas dugaan Indisipliner Pegawai/ASN Inspektorat Daerah Provinsi Banten		Juli (diluar PKPT)	1 LHP				
10	Tindak Lanjut atas Laporan adanya dugaan Kebocoran Data Penggunaan Dana Biaya Penunjang Operasional (BPO) dan/atau Biaya Operasional (BOP) Pj. Gubernur Banten Tahun Anggaran 2022		Juli (diluar PKPT)	1 LHP				
					16	17		

No	Area Pengawasan	Jumlah Laporan yang di rencanakan	RPL	Jumlah Laporan yang terealisasi	Target		Realisasi			
					Jul	Agt	Sep	Jul	Agt	Sep
1	2	3	4	5	12	13	14	15	16	17
11	Monitoring dan Evaluasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten		Juli (diluar PKPT)	1 LHP						
12	Telaahan Sejawat (Peer Review) terhadap Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten		Juli (diluar PKPT)	1 LHP						
13	Audit Tujuan Tertentu atas SPK Fiktif Pengadaan Laptop oleh Sdr. Ayub Andi Saputra, S.Ag, M.Si, PNS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten		Agustus (diluar PKPT)	1 LHP						
14	Tindak Lanjut atas Pengaduan Dewan Persaudaraan Wilayah Solidaritas Merah Putih (SOLMET) Indonesia Provinsi Banten		Agustus (diluar PKPT)	1 LHP						
15	Monitoring Center for Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Semester I Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten		Agustus (diluar PKPT)	1 LHP						
<b>Jumlah LHP yang ditargetkan</b>					<b>6 LHP</b>					
<b>Jumlah LHP di luar PKPT</b>					<b>12 LHP atau 200% dari target LHP</b>					
<b>Jumlah LHP yang direalisasikan</b>					<b>19 LHP atau 316% dari target LHP</b>					